

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 4, Mei 2023, Halaman, 152-157
e-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.7950713)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7950713>

Evaluasi Program Anggaran Pendidikan Pada Pengelolaan Mutu Pendidikan

Mia Audina Naibaho¹, Nabila Ulfiyah Nasution², Rahmiatul Zuhro³, Tulus Abdul Wahid Harahap⁴, Yusril Ardhiansyah⁵

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ^{1*}dinanaibaho60@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana evaluasi program anggaran pendidikan pada mutu pendidikan. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Artikel ini bertujuan menjelaskan terkait topik implementasi anggaran pendidikan dalam satuan pengelolaan dan penyelenggaraan mutu pendidikan di dalam sebuah sekolah lembaga pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program anggaran pendidikan dalam mutu pendidikan adalah 1) untuk mengetahui sumber dana keuangan sekolah, (2) untuk mengetahui apa saja komponen pembiayaan sekolah, (3) untuk mengetahui mekanisme penyusunan RAPBS, (4) dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaksanaan APBS. Penelitian dilakukan untuk bisa mengetahui tentang perumusan dan implementasi anggaran pendidikan pada satuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah negeri dan sekolah swasta, sehingga nantinya observasi penelitian ini bisa mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dan hal-hal yang berkaitan dengan anggaran pendidikan yang baik dan sesuai dengan peraturan pemerintahan.

Kata Kunci : *Evaluasi Program Anggaran Pendidikan, Mutu Pendidikan.*

PENDAHULUAN

Pendidikan saat ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat selain bertujuan mendukung pembangunan tetapi juga dengan tujuan meningkatkan mutu sumberdaya manusia, sehingga pendidikan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pasal 2 Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.¹ Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pengelolaan Pendidikan, Standar Proses, dan Standar Penilaian, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Di dalam pengelolaan pendidikan harus memperhatikan dan menempatkan mutu sebagai alat untuk memperbaiki serta untuk menyempurnakan pendidikan yang ada pada saat ini.

Pengelolaan satuan pendidikan dalam hal ini adalah penerapan manajemen berbasis sekolah selain mensyaratkan adanya pedoman, pengelolaan pendidikan harus berdasarkan prinsip rencana pengembangan, rencana tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk

rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran lebih rinci dari rencana jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun. (1) Rencana kerja tahunan meliputi kalender pendidikan atau akademik, (2) jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun berikutnya, (3) mata pelajaran yang diajarkan, (4) tugas mengajar bagi pendidik, (5) buku teks pelajaran yang digunakan, (6) jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana, (7) pengadaan penggunaan dan persediaan bahan habis pakai, (8) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, (9) jadwal rapat dewan guru, (10) komite sekolah, (11) jadwal penyusunan RAPBS dan laporan sejenisnya. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Rahayu dkk, 2007). Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian, 2006).

KAJIAN TEORI

Evaluasi program pendidikan merupakan seseorang yang melakukan suatu metode untuk mengetahui kinerja suatu program pendidikan dengan membandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan atau tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai dalam bentuk informasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan dan penentuan kebijakan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dengan melalui proses pengumpulan dan analisis data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program.

Pemerintah pusat memiliki anggaran yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat (39) mendefinisikan Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedisnasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Sedangkan di tingkat Provinsi, kabupaten dan kota masing-masing juga memiliki sumber anggaran, yang dikenal dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dalam APBN dan APBD dialokasikan anggaran untuk sektor pendidikan, yang dikenal dengan anggaran pendidikan dan turunannya.

Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk mata uang rupiah dan diporyeksikan untuk jangka waktu atau periode tertentu. Selain itu, APBS juga menggambarkan alokasi dan distribusi sumber-sumber keuangan kepada setiap bagian aktifitas sekolah. APBS menjadi sangat populer sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS). Salah satu kewenangan yang disentralisasikan adalah pengelolaan secara otonom berkenaan dengan manajemen pengelolaan keuangan sekolah.

Sumber dana keuangan sekolah adalah semua pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima oleh lembaga sekolah, baik dari lembaga sumber resmi ataupun dari masyarakat sendiri secara teratur. Di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 pasal 1) menjelaskan bahwa dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.

Dana pendidikan diperoleh dari 3 sumber yakni dana yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sumber dana pemerintah pusat adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik untuk membiayai kegiatan rutin yang

tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP).

Suharsimi Arikunto menyebutkan tiga asas dalam kegiatan pembiayaan pendidikan yaitu: 1) Asas plafond, artinya bahwa anggaran belanja yang dapat diminta tidak dapat melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. 2) Asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, artinya bahwa pengeluaran pembelajaran harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan. 3) Asas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerimaan uang tidak dapat secara langsung digunakan untuk suatu keperluan pengeluaran. Asas-asas tersebut mengandung pengertian bahwa jumlah pengeluaran dan belanja tidak dapat melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. Setiap bentuk pengeluaran harus didasarkan pada mata anggaran yang telah ditentukan. Jumlah uang yang diterima oleh sekolah tidak dapat langsung dibelanjakan.

Mutu adalah hal yang esensial sebagai bagian dalam proses pendidikan. Proses pembelajaran adalah tujuan organisasi pendidikan. Mutu pendidikan adalah mutu lulusan dan pelayanan yang memuaskan pihak terkait pendidikan. Mutu lulusan berkaitan dengan lulusan dengan nilai yang baik (kognitif, afektif, dan psikomotorik) diterima melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang berkualitas dan memiliki kepribadian yang baik.

Mutu pendidikan merupakan dua istilah yang berasal dari mutu dan pendidikan, artinya menunjuk pada kualitas produk yang dihasilkan lembaga pendidikan atau sekolah. Yaitu dapat diidentifikasi dari banyaknya siswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun yang lain, serta lulusan relevan dengan tujuan. Menurut pengertian di atas sekolah yang bermutu mempunyai beberapa indikator yaitu: Pertama, jumlah siswa yang banyak, ini menandakan antusias masyarakat terhadap lembaga pendidikan sangat tinggi. Kedua, memiliki prestasi akademik maupun non akademik. Ketiga, lulusan relevan dengan tujuan lembaga pendidikan, artinya sesuai standar yang telah ditentukan oleh sekolah.

Sallis (2005: 1-2) mengungkapkan ada banyak indikator mutu yang baik di lembaga pendidikan. Antara lain: 1) nilai-nilai moral/karakter yang tinggi; 2) hasil ujian yang sangat baik; 3) dukungan orang tua, dunia usaha dan masyarakat setempat; 4) sumber daya berlimpah; 5) implementasi teknologi terbaru; 6) kepemimpinan yang kuat dan memiliki tujuan (visi); 7) kepedulian dan perhatian bagi siswa; 8) kurikulum yang seimbang dan relevan.

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. "Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban" (Mulyana, 2008: 145).

Menurut Sugiyono (2007: 1), metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2008: 150).

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter, sesuai dengan metode yang dipergunakan (Gulo, 2000).

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah

(Arikunto, 2006). Instrumen pengumpul data menurut sumadi suryabrata adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikolog. Atribut-atribut psikologis itu secara teknis biasanya digolongkan menjadi atribut kognitif dan atribut non kognitif (Suryabrata, 2008) . Ibnu hadjar berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif (Ibnu Hadjar, 1996).

2. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode penelitian satu ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya. Sehingga menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang terjadi.

Metode penelitian ini kemudian berbeda dengan metode lain yang cenderung lebih fokus pada pembahasan kenapa suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Dimana peristiwa dan fenomena yang dimaksudkan disini adalah objek penelitian. Hasil penelitiannya tentu saja akan menggambarkan objek penelitian dengan detail pada sekolah.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah guru , tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862). Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini, adalah kepala sekolahnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal hasil penyajian data yang peneliti sajikan pada rumusan masalah yang berisi deskripsi temuan pada sub bab sebelumnya. Maka secara mendetail dan sistematis dapat peneliti sampaikan temuan-temuan apa saja yang diperoleh dari hasil penyajian data tersebut, dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Dalam sekolah ini, sumber dana keuangan sekolah yang di gunakan yaitu berdasarkan dari Pemerintah. Sumber dana ini diperoleh sepenuhnya dari pemerintah pusat baik itu dalam hal pembelajaran disekolah dan juga pembagunan sekolah. Sumber dana keuangan sekolah ini diberikan pemerintah pusat untuk bisa disalurkan dalam pembiayaan kegiatan rutin yang ada disekolah, dan dalam pembiayaan pembangunan sekolah.

Pemerintah pusat memberikan bantuan ini sepenuhnya kepada sekolah karena dalam hal ini sekolah ini merupakan sekolah negeri yang memang ditanggung oleh pemerintah. Adapapun bantuan yang berikan pemerintah disekolah yaitu berupa bantuan yang disebut dengan dana BOS.

Dana BOS ini diberikan pemerintah kepada sekolah lebih kurang 4 kali dalam setahun. Pemberian dana BOS ini bukanlah pemberian yang berlaku secara langsung, maksudnya bantuan ini hanya bisa diterima oleh sekolah jika dana BOS ini keluar, dan apabila dana BOS ini tidak keluar maka dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam pembiayaan kegiatan di sekolah adalah kepala sekolah.

Kepala sekolahlah yang akan membantu pengalokasian sumber dana keuangan ini, sehingga nantinya sekolah ini tidak kekurangan biaya pendidikan. Kepala sekolah juga yang nantinya akan berperan penting dalam pengeluaran sumber dana keuangan ini, baik itu pengeluaran kegiatan sekolah, dan pengeluaran prasarana sekolah.

Tetapi nantinya apabila dana BOS yang dari pemerintah sudah keluar maka uang kepala sekolah akan kembali. Dalam hal ini kepala sekolah hanya menutup kekurangan dana keuangan sekolah saja, akibat dana BOS yang dari pemerintah belum keluar dan juga belum cukup dalam pembiayaan pendidikan di sekolah.

Komponen-komponen pembiayaan yang diperoleh disekolah merupakan suatu anggaran yang sudah ditetapkan dengan betul dengan memperhatikan kekurangan yang akan terjadi dalam pengelolaan komponen pembiayaan ini.

Dari hasil observasi penelitian yang dilakukan didalam sekolah, maka selanjutnya akan dibahas mengenai implikasi hasil penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Sumber dana keuangan sekolah

Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa yang menjadi sumber dana keuangan sekolah adalah sepenuhnya dari dana BOS. Dalam hal ini dana yang di dapatkan dari pemerintah berupa dana BOS yang diperoleh 3 kali dalam 1 Tahun akan membuat sekolah ini menjadi kekuarangan anggaran pendidikan sekolah. Baik itu dalam fasilitas sekolah, prasarana sekolah, dan juga dalam kegiatan-kegiatan sekolah.

Oleh karena itu, dalam hal ini pihak sekolah harus memberikan pemasukan sumber dana keuangan yang nantinya akan membantu sekolah dalam proses pengeluaran biaya kegiatan sekolah. Sumber dana yang didapatkan di sekolah baik itu berupa dari koperasi sekolah, iuran sekolah dan lainnya akan memebantu sekolah dalam pengalokasian sumber dana keuangan sekolah dalam menstabilkan dana pengeluaran sekolah yang kurang.

2. Komponen Pembiayaan sekolah

Dari hasil observasi penelitian ini, maka komponen yang seharusnya ada dalam pembiayaan sekolah itu merupakan hal yang wajib ada dalam setiap sekolah, baik itu dalam sekolah negeri, dan sekolah swasta untuk bisa melukakan pengelolaan dan penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Komponen-komponen ini lah yang nantinya berperan penting dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

3. Mekanisme Penyusunan Rencana APBS

Dari hasil observasi penelitian yang dilakukan di sekolah negeri dan sekolah swasta itu memiliki mekanisme penyusunan rencana APBS yang begitu baik untuk bisa membuat penyusunan rencana APBS. Dalam mekanisme ini nantinya akan membuat penyusunan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang dibuat dan ditentukan.

4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBS

Setelah melakukan observasi penelitian seperti di atas, maka dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan ini merupakan suatu ketentuan yang sudah dibuat oleh sekolah sehingga sekolah tersebut bisa berjalan dengan lanjar seperti sekarang. Dalam pertanggungjawaban ini plakanaan ini memang dilakukan dengan orang-orang yang akan membantu dalam pelaksanaan APBS ini. Setiap sekolah yang diteliti memiliki orang-orang yang berperan penting dalam pelaksanaan APBS yang akan bertanggungjawab dalam pelaksanaan ini adalah bendaha sekolah, operator sekolah, dan kepala sekolah.

KESIMPULAN

Kesimpulan ini merupakan hasil reflektif yang mewakili muatan utama dan penelitian ini. Maka peneliti menarik kesimpulan bahwa rumusan dan implementasi anggaran pendidikan di satuan pengelolaan/penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di sekolah negeri dan swasta ini. Dari sini terdapat problem-promlem informasi baru yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu sebgai berikut :

1) Sumber dana keuangan sekolah

Sumber dana keuangan sekolah ini merupakan sumber dana yang sangat dibutuhkan di dalam sekolah dalam membangun penyelenggaraan pendidikan di sekolah. sumber dana ini deperoleh oleh bantaun pemerintah, bantuan siswa dan orang tua, dan juga bisa diperoleh dalam bantuan masyarakat setempat untuk bisa menyelenggarakan sekolah ini.

2) Komponen Pembiayaan Sekolah

Dalam hal mengenai komponen ini maka komponen ini dibutuhkan dalam penyelenggaraan anggaran sekolah sehingga sekolah terebut membuat kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan sekolah

3) Mekanisme penyusunan sekolah

Setelah melakukan observasi di sekolah, peneliti menemukan bahwa dalam sekolah itu mekanisme penyusunannya itu selain yang ada dalam penelitian ini juga mekanismenya itu dilakukan berdasarkan pengeluaran dana BOS yang berjalan di suatu sekolah tersebut.

4) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBS

Pertanggungjawaban pelaksanaan ini dilakukan untuk membuat laporan keuangan sekolah yang sesuai dengan ketentuan dan nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh pihak yang bersangkutan.

Referensi

- Adhli, M. (2017). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. *TADBIR : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(2), 216-240.
<https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/2688>
- Arifudin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 161–169.
- Bastian, I., 2006a. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Erlangga. Jakarta. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Martin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 *Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Rahayu, Sri. dkk. 2007. *Studi Fenomenologis terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris Dari SKPD di Propinsi Jambi*. Simposium Nasional Akuntansi 10. Makassar 26 -28 Juli 2007.
- Sagala, Syaiful., (2011). *Konsep dan makna pembelajaran*, Bandung: Alfabeta.
- Sallis, E. (2005). *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page Limited.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.